



Article Informations
Corresponding Email:
wafyfahimatulaisy@gmail.com

Received: 08/01/2025; Accepted:
27/02/2025; Published: 27/02/2025

UPAYA THE UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN) DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN INDIA PADA TRADISI DOWRY TAHUN 2018-2022

Wafy Fahimatul Aisy ¹⁾, **Iing Nurdin** ²⁾, **Nala Nourma Nastiti**³⁾

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di India akibat tradisi dowry pada 2018–2022. Tradisi ini sering memicu kekerasan berbasis gender, termasuk kematian akibat dowry. Meski pemerintah India telah memberlakukan Dowry Prohibition Act, implementasinya masih terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori Konstruktivisme untuk mengevaluasi pengaruh norma internasional terkait kesetaraan gender yang dipromosikan UN Women terhadap kebijakan domestik. Selain itu, teori kekerasan Johan Galtung membantu memahami kekerasan dalam lapisan langsung, struktural, dan kultural. Hasil menunjukkan bahwa UN Women berkontribusi melalui dukungan teknis, advokasi kebijakan, dan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Walaupun kesadaran gender meningkat dan insiden kekerasan berkurang, hambatan sosial-budaya yang mengakar masih menjadi tantangan utama.

Kata Kunci: UN Women, kekerasan berbasis gender, tradisi dowry

Abstract

This study examines the role of UN Women in addressing violence against women in India caused by the dowry tradition during 2018– 2022. The dowry practice often triggers gender-based violence, including dowry-related deaths. Despite the Indian government's implementation of the Dowry Prohibition Act, its enforcement remains challenging. This qualitative descriptive research employs Constructivist theory to evaluate the influence of international norms on gender equality promoted by UN Women on domestic policies. Additionally, Johan Galtung's theory of violence is applied to analyze layers of violence—direct, structural, and cultural—experienced by women in the dowry context. Findings reveal that UN Women has significantly contributed through technical support, policy advocacy,

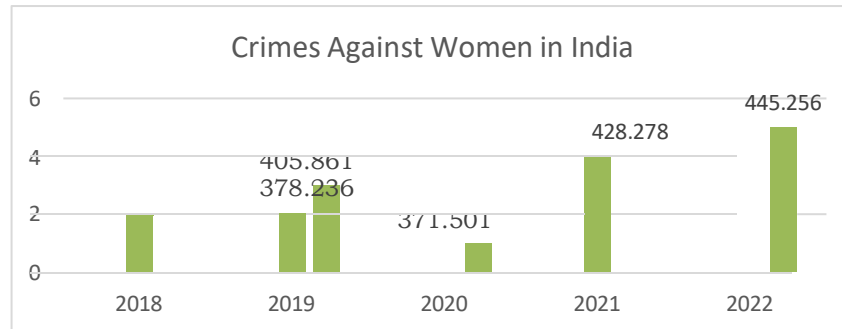
and collaboration with the government and civil society organizations. While gender awareness has improved and incidents of violence have declined, deeply rooted socio-cultural factors continue to hinder efforts to eradicate dowry-related violence.

Keywords: *UN Women, gender-based violence, dowry tradition.*

PENDAHULUAN

Diskriminasi gender terhadap perempuan di India menjadi isu yang kompleks karena menyentuh berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Meskipun India mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa sektor, masalah ketidaksetaraan gender tetap menjadi tantangan besar yang meluas di berbagai aspek kehidupan perempuan. Ketidaksetaraan ini terlihat dari kesenjangan pendidikan, ketidakadilan dalam pekerjaan, serta rendahnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Salah satu manifestasi terburuk dari diskriminasi ini adalah kekerasan berbasis gender (*gender-based violence/GBV*). GBV di India tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga kekerasan struktural dan kultural. Tradisi *dowry* menjadi salah satu sumber utama kekerasan terhadap perempuan. Awalnya dimaksudkan sebagai bentuk dukungan finansial untuk perempuan, praktik ini kini telah berubah menjadi beban finansial berat bagi keluarga perempuan. Tekanan untuk menyediakan *dowry* sering berujung pada kekerasan bahkan kematian, yang dikenal sebagai *dowry deaths*. Menurut laporan *National Crime Records Bureau (NCRB)*, selama periode 2018–2022 terdapat 2.029.154 kasus kekerasan terhadap perempuan di India, dengan 31,4% kasus berasal dari kekerasan dalam rumah tangga terkait *dowry*. Kondisi ini mencerminkan urgensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh.

Tabel 1.1 Kasus kekerasan pada Perempuan di India tahun 2018-2022



Sumber : National Crime Records Bureau, *NCRB Report*, 2023.

Kekerasan terkait *dowry* di India menjadi isu global karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan norma-norma kesetaraan gender yang dijunjung tinggi oleh komunitas internasional. Meski pemerintah India telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti *Dowry Prohibition Act* dan ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, efektivitas implementasinya masih rendah. *UN Women*, sebagai badan internasional di bawah PBB, telah berperan dalam mendorong perubahan melalui advokasi, dukungan teknis, dan kolaborasi dengan pemerintah serta masyarakat sipil. Keberadaan *UN Women* menjadi penting untuk memastikan bahwa norma-norma internasional tentang kesetaraan gender dapat diterapkan di tingkat domestik, termasuk dalam mengatasi masalah *dowry*.

PEMBAHASAN

A. Sejarah UN Women

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) merupakan organisasi di bawah *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* yang didirikan pada 2 Juli 2010 dan mulai beroperasi sejak Januari 2011. Organisasi ini

bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memperkuat visi kesetaraan sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB. Sejarah *UN Women* melibatkan penggabungan beberapa badan sebelumnya, termasuk *Department for Women's Development* (DAW), INSTAW, OSAGI, dan UNIFEM. Pembentukan ini ditujukan untuk memperkuat upaya yang telah dilakukan oleh entitas lain di PBB, seperti UNICEF, UNDP, dan UNFPA. Direktur Eksekutif pertama *UN Women* adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chili. *UN Women* berperan penting dalam memantau kemajuan kesetaraan gender, mengembangkan standar global, dan meminta pertanggungjawaban negara-negara terhadap komitmen mereka. *Commission on the Status of Women* (CSW) merupakan badan antar pemerintah di bawah *UN Women* yang fokus pada kebijakan dan norma global terkait kesetaraan gender.

B. Hadirnya UN Women di India

India menjadi salah satu prioritas *UN Women* sejak ratifikasi Convention on the *Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 1993. *UN Women* mulai mengelola program di India sejak 2005, dengan fokus utama pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan, pemberantasan kekerasan berbasis gender, peningkatan hak ekonomi perempuan melalui pekerjaan layak, serta implementasi hukum yang mendukung hak-hak perempuan. Kantor *UN Women* di India berbasis di New Delhi dan mencakup empat negara: India, Bhutan, Maladewa, dan Sri Lanka. *UN Women* bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok perempuan untuk mempromosikan strategi nasional yang mendukung kesetaraan gender. Program-programnya bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi perempuan dan anak perempuan, memungkinkan mereka untuk menikmati hak-hak sebagai warga negara setara melalui kebijakan, hukum, dan program yang pro-perempuan.

Latar Belakang India dan Isu Kekerasan terhadap Perempuan

A. Latar Belakang India

India, negara di Asia Selatan, merupakan yang terpadat kedua di dunia dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa pada tahun 2022. Dengan luas 3,29 juta kilometer persegi, India terdiri dari 28 negara bagian dan 8 wilayah persatuan, beribu kota di New Delhi. Dikenal sebagai negara agraris, perekonomian India termasuk terbesar ketiga dunia berdasarkan PDB, dengan pertumbuhan yang pesat. Mayoritas penduduknya menganut agama Hindu (79,8%), disusul Muslim (14,2%), Kristen (2,3%), dan Sikh (1,7%). India memiliki sistem sosial berbasis kasta yang ketat, mencerminkan stratifikasi hierarkis masyarakatnya. Sistem kasta, yang berasal dari era invasi bangsa Arya sekitar 1500 SM, menjadi elemen budaya yang signifikan. Kasta tertinggi, Brahmana, dianggap suci, sedangkan kasta terendah, Dalit, sering mengalami diskriminasi dan eksploitasi. Dalam konteks ini, perempuan dari kasta rendah menghadapi tantangan berat, seperti pekerjaan yang merendahkan serta kekerasan yang sering terjadi akibat budaya patriarki dan tradisi seperti *dowry*.

B. Isu Kekerasan terhadap Perempuan di India

Kekerasan terhadap perempuan di India berakar dari faktor budaya, patriarki, dan kepercayaan sosial. Penelitian ini menggunakan kerangka Johan Galtung yang membagi kekerasan menjadi langsung, struktural, dan kultural. Bentuk kekerasan utama mencakup kekerasan rumah tangga, pemerkosaan, penculikan, penyiksaan, dan kematian terkait *dowry*.

1. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung melibatkan tindakan seperti pemerkosaan, penculikan, dan penyiksaan fisik. Misalnya, laporan National Crime Records Bureau (NCRB) mencatat fluktuasi kasus pemerkosaan antara 2018-2022, dengan 33.752 kasus pada 2022, meningkat 6,57% dari tahun sebelumnya. Kasus terkenal, seperti pemerkosaan di Unnao dan Hathras, menunjukkan

pengaruh politik dan diskriminasi terhadap kelompok rentan.

2. **Penculikan dan Penyekapan**

Selama periode 2018-2022, kasus penculikan menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2022, tercatat 106.077 kasus, naik 4,79% dari tahun sebelumnya. Tujuan penculikan sering kali melibatkan eksploitasi atau kekerasan terhadap korban perempuan, terutama dari kelompok marjinal.

3. **Penyerangan Seksual**

Kasus penyerangan seksual terus meningkat, dengan 42.216 kasus tercatat pada 2022. Insiden ini sering terjadi di tempat kerja, ruang publik, dan rumah, mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap perempuan di berbagai lingkungan.

4. **Kekerasan oleh Suami dan Kerabat**

Kekerasan domestik, yang dilaporkan mencapai 138.379 kasus pada 2022, sering disebabkan oleh budaya patriarki dan ketergantungan finansial perempuan. Banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan karena takut akan stigma sosial dan dampaknya pada keluarga.

5. **Kematian Akibat Dowry**

Tradisi *dowry* sering memicu kekerasan domestik yang berujung pada kematian perempuan. Pelaku biasanya membakar korban untuk menyamarkan pembunuhan sebagai kecelakaan. Dalam kasus ini, perempuan dipaksa memenuhi tuntutan tambahan *dowry*, dan kegagalan memenuhi tuntutan tersebut berujung pada penyiksaan fisik hingga kematian.

C. **Kekerasan Kultural pada Perempuan di India**

Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang muncul dari struktur sosial yang tidak adil, di mana perempuan menjadi korban dari sistem patriarki, kapitalisme, dan modernisasi. Dalam masyarakat India, patriarki memberikan dominasi kepada laki-laki dalam ekonomi dan politik, sedangkan

perempuan sering kali dipinggirkan dalam pengelolaan sumber daya. Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk merekrut perempuan dari keluarga miskin sebagai tenaga kerja murah dengan iming-iming gaji yang dapat digunakan untuk *dowry*. Namun, banyak perempuan yang terjebak dalam kontrak kerja penuh kekerasan, seperti pengekapan, kerja berlebihan, upah rendah, hingga tidak dibayar sama sekali.

Menurut Johan Galtung, kekerasan struktural terjadi ketika kelompok tertentu, dalam hal ini laki-laki, menyalahgunakan sumber daya dan akses ke ruang publik. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan gender, di mana kepentingan perempuan sering diabaikan. Salah satu manifestasinya adalah kegagalan negara memberikan perlindungan yang layak bagi perempuan. Misalnya, meskipun terdapat *Dowry Prohibition Act*, praktik *dowry* masih merajalela karena ketidaktegasan penegakan hukum. Bahkan, hukum perceraian yang ada sering kali tidak efektif karena proses yang rumit dan mahal, sehingga perempuan tetap terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan.

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual juga kerap bias, di mana perempuan korban sering disalahkan atau dipermalukan. Hal ini menciptakan stigma sosial yang menghalangi korban mendapatkan keadilan, sementara sanksi bagi pelaku cenderung ringan. Struktur keluarga patriarkal semakin memperburuk situasi dengan menuntut perempuan untuk mematuhi laki-laki, yang sering digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Modernisasi dan kapitalisme turut memperkuat tradisi *dowry* yang menyebabkan kekerasan, bahkan pembunuhan, ketika tuntutan tambahan tidak terpenuhi. Akibatnya, perempuan terjebak dalam siklus kekerasan dan ekspektasi sosial yang tidak realistis. Kekerasan struktural ini merupakan wujud nyata dari ketidakadilan sistemik yang mengakar pada patriarki, menunjukkan perlunya reformasi

mendalam dalam kebijakan sosial dan hukum untuk menjamin hak-hak perempuan di India.

D. Kekerasan Kultural pada Perempuan di India

Kekerasan kultural merujuk pada pembenaran kekerasan melalui elemen budaya, simbol, atau norma sosial, yang menjadikannya terlihat sah atau wajar. Kekerasan ini memperkuat kekerasan struktural dan langsung, menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit diputus. Di India, sistem kasta yang telah ada selama ribuan tahun menjadi salah satu bentuk kekerasan kultural. Sistem ini membagi masyarakat ke dalam hierarki sosial, di mana perempuan dari kasta rendah, seperti Dalit, sering menjadi korban kekerasan seksual dan diskriminasi. Sejak tahun 1980-an, nilai-nilai Brahmanisme kembali menguat, menempatkan kasta Brahmana di posisi tertinggi. Tradisi ini tidak hanya berdampak pada Hindu, tetapi juga komunitas lainnya. Tradisi *dowry* menjadi contoh nyata kekerasan yang dilegitimasi oleh norma sosial. Perempuan dipaksa menyerahkan *dowry* kepada keluarga laki-laki, dan permintaan tambahan yang tidak terpenuhi sering kali memicu kekerasan, termasuk penganiayaan dan pembunuhan.

Selain itu, prinsip *pativrata* menuntut perempuan untuk taat kepada suami, memperkuat posisi subordinasi mereka dalam keluarga. Norma ini membuat perempuan merasa tidak berdaya

untuk melawan kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Banyak perempuan yang enggan melaporkan kekerasan karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, yang sering kali bersifat non-intervensi dan bias terhadap korban. Akibatnya, perempuan di India menghadapi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari *infanticide*, aborsi selektif, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakadilan ini

diperparah oleh nilai-nilai konservatif dan diskriminasi gender yang membatasi akses perempuan ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Reformasi dalam struktur sosial, budaya, dan hukum diperlukan untuk memutus siklus kekerasan dan memberikan keadilan bagi perempuan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya kesetaraan gender, praktik tradisi dowry di India terus menjadi tantangan besar yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan. Tradisi ini berakar dalam budaya India dan telah menyebabkan berbagai bentuk kekerasan domestik, yang mencakup penyiksaan fisik dan psikologis. Dalam periode 2018 hingga 2022, UN Women berperan aktif dalam menangani masalah ini melalui berbagai inisiatif, bekerja sama dengan pemerintah India, LSM, dan aktor internasional lainnya. Berdasarkan peran organisasi internasional menurut Kelly-Kate Pease, UN Women berfokus pada empat aspek utama: aktor dalam tata kelola global, pemimpin normatif, pendorong kerjasama internasional, dan sebagai aktor non-negara melalui soft power.

1. Aktor dalam Tata Kelola Global

Menurut Pease, organisasi internasional seperti *UN Women* berperan penting dalam tata kelola global, di mana mereka mengkoordinasikan tindakan internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks tradisi dowry di India, *UN Women* berfungsi sebagai koordinator upaya global dan lokal untuk mengurangi kekerasan berbasis gender yang terkait dengan praktik dowry. Melalui kerjasama antara negara-negara, LSM, dan aktor lainnya, *UN Women* memfasilitasi koordinasi upaya untuk menciptakan perubahan yang lebih luas di tingkat internasional dan lokal. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah

meningkatkan dukungan terhadap penegakan norma internasional yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan.

2. Pemimpin Normatif

UN Women berperan sebagai pemimpin normatif dengan menciptakan dan mempromosikan standar internasional terkait hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Salah satu aspek utama yang diperjuangkan adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang terkait dengan tradisi dowry. *UN Women* mendorong negara-negara untuk meratifikasi dan melaksanakan konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), serta mendorong implementasi kebijakan dan hukum yang mendukung perlindungan perempuan. Keberadaan *UN Women* tidak menggantikan tetapi melengkapi upaya yang dilakukan oleh berbagai badan PBB, seperti UNICEF dan UNDP, untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara global.

3. Pendorong Kerjasama Internasional

UN Women juga berfungsi sebagai pendorong kerjasama internasional. Dalam hal ini, organisasi ini mendukung kolaborasi antara negara-negara dan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi masalah kekerasan berbasis gender yang melibatkan banyak pihak. Di India, *UN Women* bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan kelompok advokasi perempuan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menangani dampak tradisi *dowry*, termasuk melalui dua program utama: **Program Pendidikan** dan **Program Ekonomi**.

A. Program Pendidikan - Second Chance Education

Program pendidikan seperti **Second Chance Education**

bertujuan untuk memberdayakan perempuan di India dengan meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan dan pelatihan vokasional. Program ini diluncurkan pada 2018 dan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 30.000 perempuan dari komunitas rentan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing perempuan di dunia kerja, yang secara tidak langsung juga membantu mengurangi ketergantungan ekonomi yang dapat menyebabkan praktik *dowry*. Selain itu, program ini berfokus pada integrasi perempuan ke dalam sektor ekonomi dengan memberikan mereka kesempatan kedua dalam pendidikan formal dan pelatihan.

B. Program Ekonomi - Gender Responsive Budgeting

Selain pendidikan, *UN Women* mendukung penerapan *Gender Responsive Budgeting* (GRB) di India, yang memastikan bahwa anggaran pemerintah mencakup kebutuhan perempuan dan mendukung program yang berfokus pada pemberdayaan mereka. Melalui kebijakan ini, pemerintah India telah berhasil meningkatkan alokasi anggaran untuk program perempuan, seperti yang terlihat di Kerala, yang berhasil meningkatkan alokasi anggaran untuk perempuan dari 11,4% pada 2017-18 menjadi 20,9% pada 2022-23. GRB ini berfungsi untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dan sosial yang dihadapi perempuan, serta memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi.

4. Sebagai Aktor Non-Negara melalui Soft Power

Sebagai aktor non-negara, *UN Women* memanfaatkan soft power untuk memengaruhi perubahan dalam masyarakat, terutama melalui advokasi dan peningkatan kesadaran. Tidak memiliki kekuatan koersif seperti militer, *UN Women* lebih mengandalkan pengaruh normatif dan dukungan advokasi dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk soft power yang digunakan adalah kampanye global yang

menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

A. Advokasi melalui Kampanye

Beberapa kampanye yang diluncurkan oleh *UN Women* antara lain **#HeForShe**, **#InternationalWomensDay**, **#OrangeDay**, dan **#AbkoiBahanaNahi**. Kampanye **#HeForShe** bertujuan untuk mengajak pria dan anak laki-laki untuk terlibat aktif dalam upaya mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Kampanye ini telah berhasil menjangkau lebih dari 7 juta orang. Selain itu, kampanye **#AbkoiBahanaNahi** berfokus pada pemberdayaan perempuan dan mengajak berbagai pihak untuk berkomitmen melawan kekerasan berbasis gender. Kampanye ini juga berhasil menjangkau lebih dari 4 juta orang dan menciptakan 19,3 juta tayangan media sosial, menyebarkan pesan penting mengenai perlunya perubahan budaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

B. Hari Perempuan Internasional dan 16 Hari Aksi

Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret menjadi ajang untuk menyoroti pentingnya investasi dalam pemberdayaan perempuan. *UN Women* juga mendukung inisiatif **16 Hari Aksi** (dari 25 November hingga 10 Desember) untuk menggalang aksi global dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Melalui acara pawai, diskusi panel, dan platform digital, *UN Women* terus berupaya meningkatkan kesadaran tentang perlunya perubahan dalam norma sosial yang mendukung kekerasan berbasis gender.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *UN Women* memainkan peran penting dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di India yang terkait dengan tradisi dowry pada periode 2018-2022. Melalui program advokasi, peningkatan kesadaran, dan pelatihan, *UN Women* bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk mengurangi angka kekerasan berbasis gender. Sebagai organisasi internasional, *UN Women* memiliki pengaruh besar dalam menetapkan standar global terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta berfungsi sebagai fasilitator kerjasama lintas negara dan pemimpin normatif dalam kebijakan internasional. Namun, upaya ini menghadapi tantangan dari norma budaya yang sudah lama tertanam, seperti patriarki dan sistem kasta di India. Praktik *dowry* yang mendorong berbagai bentuk kekerasan masih sulit diberantas, meskipun telah ada kebijakan internasional dan nasional yang diterapkan. Penelitian mendatang disarankan untuk menggali lebih lanjut mengenai peran kerjasama internasional dalam mengatasi norma-norma budaya yang mendukung kekerasan, serta mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kampanye global untuk mengurangi kekerasan berbasis *dowry* di India.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, Priya R. "Dowry in 21st-Century India: The Sociocultural Face of Exploitation." *Trauma, Violence & Abuse* 15, no. 1 (2014): 34-40. <https://www.jstor.org/stable/26638331>.
- Chakravarti, Uma. "Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, Caste, Class, and State." *Economic and Political Weekly* 28, no. 14 (1993): 579.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Ferguson, Susan Jane. "UN Women's #AbKoiBahanaNahi Campaign Reaches 4.28M People." *LinkedIn*, 2022. <https://www.linkedin.com/pulse/un-womens-abkoibahananahi-campaign-reaches-428mn-susan-jane-ferguson-vdlsc/>.
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: SAGE Publications, 1996.

- Galtung, Johan. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (1990): 291–305. <http://www.jstor.org/stable/423472>.
- GuruPendidikan. 'Studi Kepustakaan.' Internet, online. Accessed June 3, 2024. <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepuustakaan/>.
- Steans, Jill. *Gender and International Relations*. Cambridge: Polity, 1998.
- Statista. "Reported Dowry Death Cases in India." Accessed July 20, 2024. <https://www.statista.com/statistics/632553/reported-dowry-death-cases-india/>.
- Thomson Reuters Foundation. "India Is the World's Most Dangerous Country for Women, Survey Shows." Last modified June 12, 2018. <https://news.trust.org/item/20180612134519-cxz54/>.
- Tribun News. "Data PBB: 35 Persen Perempuan di Dunia Pernah Mengalami Kekerasan Fisik dan Seksual." Accessed June 21, 2024. https://aceh.tribunnews.com/2017/11/29/data-pbb-35-persen-perempuan-di-dunia-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-dan-seksual?page=all#google_vignette.
- United Nations Development Programme. "Human Development Reports: Gender Inequality Index (GII)." Accessed May 25, 2024. <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>.
- UN Women. *UN Creates New Structure for Empowerment of Women*. UN Women Headquarters, 2010. <https://www.unWomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-Women>.
- UN Women. "Orange the World." UN Women, <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/unite/orange-the-world>.
- Visvanathan, Ed. *Am I a Hindu?* Denpasar: Pustaka Manik Geni, 2000.
- Wadjo, H., and J. Saimima. "Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Context of Realizing Restorative Justice." *Belo Journal* 6, no. 1 (2020): 48.